

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS
KOMUNITAS DI KELURAHAN SAMBIROTO KECAMATAN TEMBALANG
KOTA SEMARANG**

Oleh:

Ulfa Azizah, Aufarul Marom

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia sampah telah menjadi permasalahan rumit yang selalu terjadi bahkan semakin rumit khususnya di Kota Semarang. Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Semarang khususnya. Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan pengelolaan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Aspek yang disoroti dalam penelitian ini adalah tingkat komunikasi serta ketersediaan sumberdaya manusia maupun non manusia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang sudah baik namun belum optimal. Kendala dalam program ini berupa kendala teknis, kurang tersedianya sumber daya manusia dan non manusia termasuk pula dana. Perlu adanya peningkatan komitmen dan kinerja dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program agar program yang bermanfaat ini dapat berkembang dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, Komunikasi dan Sumber Daya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Yang mana sandang merupakan kebutuhan untuk berpakaian, pangan merupakan kebutuhan untuk makan dan minum, serta papan merupakan kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal. Dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasar tersebut terkadang manusia tidak sadar dengan limbah yang dihasilkan setelah menggunakan atau mengkonsumsinya, yaitu sampah. Terutama di kota-kota besar sampah masih menjadi permasalahan utama. Sampah yang tidak terorganisir dengan baik akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Faktor yang menjadi salah satu pemicu masalah sampah adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya, karena hakikatnya setiap orang dalam satu hari pasti menghasilkan sampah atau limbah pembuangan atas pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Faktor lain yang menjadi pendukung pertumbuhan sampah yang semakin menumpuk di kota-kota besar adalah meningkatnya laju urbanisasi

sehingga semakin padat jumlah penduduk di kota besar maka semakin banyak pula limbah rumah tangga yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi pun menjadi salah satu faktornya, yaitu dengan semakin tingginya kemampuan seseorang untuk menggunakan atau mengonsumsi barang maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan yang dikonsumsi.

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah ini pemerintah telah banyak membuat alternatif penyelesaiannya. Kota Semarang sendiri telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik. Penjelasannya terdapat pada pasal 6 ayat (c) yang menyebutkan Pemerintah Daerah memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya penanganan, pengurangan dan pemanfaatan sampah. Dalam upaya tersebut diatur pula pada pasal 27 ayat (a) Pemerintah Daerah memiliki tugas dalam pengangkutan sampah yang dilaksanakan dengan cara sampah rumah tangga diangkut ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk dalam lingkup RT/RW atau Kelurahan.

Salah satu usaha Pemerintah Daerah Kota Semarang yaitu dengan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas. Bentuk nyata dari program ini yaitu warga diberi modal berupa sarana dan fasilitas untuk pembuangan sampah. Mekanisme kerja dari program ini menggunakan armada pengangkut sampah yang beroperasi mengangkut sampah dari rumah warga. Sasaran dari program ini adalah langsung pada sumbernya yaitu rumah tangga. Cara ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu penumpukan sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan ini salah satunya disebabkan karena masyarakat malas untuk membuang sampah sampai akhirnya sampah menumpuk di banyak tempat. Disamping itu kurangnya sarana pembuangan sampah semakin memicu permasalahan tersebut.

Proses pengelolaan sampah ini dimulai dari tahap pewadahan dan pemilahan. Pada proses ini masyarakatlah yang berperan, dari tingkat rumah tangga masyarakat melakukan pewadahan atas sampah-sampah rumah tangga dan pemilahan sampah berdasarkan klasifikasi masing-masing sampah. Proses pewadahan tersebut sangat penting agar petugas pengangkut sampah lebih mudah dalam mengangkut sampah. Proses selanjutnya adalah pengangkutan. Proses pengangkutan dilakukan oleh petugas

pengangkut sampah sebanyak 3 kali seminggu dengan menggunakan armada pengangkut sampah. Setelah proses pengangkutan dilakukan proses selanjutnya yaitu pengolahan. Proses pengolahan ini dilakukan di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yang selanjutnya sampah diangkut oleh petugas pengangkut sampah dari Pemkot Semarang ke TPA Jatibarang. Tahap pemrosesan akhir dilakukan oleh petugas sampah dari Pemkot Semarang.

Seiring berjalannya program ini, dalam implementasiya dirasakan masih terdapat banyak kendala teknis yang terjadi. Terutama masyarakat yang dibuat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program ini. Kondisi pemukiman di Kelurahan Sambiroto pada umumnya merupakan pemukiman yang padat dengan rumah-rumah warga yang berada di dalam gang-gang sempit. Ada pula beberapa rumah warga yang benar-benar sangat berada di dalam gang sempit dan terbelakang. Hal ini yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program. Dengan sulitnya akses untuk motor pengangkut sampah tersebut menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan program ini. Sering beberapa rumah warga luput dari jangkauan petugas pengangkut sampah. Dengan keadaan seperti ini warga yang merasa sudah membayar merasa

tidak adil. Mereka sudah membayar namun petugas pengangkut sampah tidak mengangkut sampah dari rumah mereka. Hal ini menimbulkan kurang maksimalnya penanganan sampah di Kelurahan Sambiroto tersebut.

Kendala implementasi program ini juga terdapat pada sistem pembayaran. Dengan terlambatnya pembayaran uang iuran sesuai jadwal yang ditentukan akan mempengaruhi keberlangsungan pengangkutan sampah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan terkait pada pelaksanaan serta proses implementasi program pengelolaan sampah ini. Penguatan kelembagaan yang diusahakan oleh pengelola program ini akan menciptakan keadaan yang efisien dan efektif serta dibutuhkannya dukungan penuh dari pemerintah daerah.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Menjelaskan proses pelaksanaan implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang
2. Menyajikan secara rinci aspek-aspek apa saja yang menjadi kendala di dalam mengimplementasikan program pengelolaan sampah tersebut

C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (Purwanto,2012:58), mengatakan bahwa

administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (Purwanto,2012:58), mendefinisikan administrasi publik, adalah (1) Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik; (2) Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah; (3) Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap uaha sejumlah orang.

Thomas R. Dye (Islamy,2007:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”, yaitu bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu, namun konsep ini tidak memberikan pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Richard Rose (Winarno, 2008:17) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai :serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-

konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri". Definisi ini sebenarnya bersifat ambigu, namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan, dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Implementasi program atau kebijakan merupakan suatu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan (Setiyadi,2005)

Menurut Merille S. Grindle (dalam Subarsono,2005:93) juga menjelaskan bahwa keberhasilan Implementasi juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan impelentasi (*content of implementastion*).

Variabel isi kebijakan mencakup : (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah

kebijakan sudah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Variabel lingkungan impelentasi mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dn daya tanggap kelompok sasaran.

Model implementasi model George C. Edward III memuat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan (dalam Subarsono,2005:91). Empat variabel tersebut adalah :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari impelentasi kebijakan publik. Impelentasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan

(atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif.

3. Disposisi/ Sikap

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti : komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi dari pelaksana kebijakan publik adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui tetapi mempunyai

kemampuan untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang menjadi standart. (dalam Winarno,2008;24)

D. OPERASIONALISASI KONSEP

1.Implementasi Program, dapat diukur dengan :

- a. Tujuan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang
- b. Kemampuan program dalam mengurangi permasalahan sampah di Kelurahan Sambiroto
- c. Partisipasi masyarakat dalam program ini
- d. Cara pendataan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program ini

e. Proses pelaksanaan program ini

1. Kendala Program

a. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses Implementasi Program Pengelolaan Sampah tersebut?

2. Komunikasi

Gejala Komunikasi yaitu :

1. Kelancaran proses transmisi, dapat diukur dengan :

- a. Intensitas pertemuan antara aparatur pelaksana dan penerima program
- b. Media yang digunakan dalam proses komunikasi

2. Kejelasan perintah implementasi program, dapat diukur dengan :

- a. Kejelasan program
- b. Informasi yang diterima

3. Konsistensi pelaksanaan kebijakan, dapat diukur dengan :

- a. Ketepatan informasi
- b. Tingkat sosialisasi

3. Sumber Daya

Sumber daya Pelaksana :

Gejala Sumber daya :

1. Tingkat ketersediaan Sumber

daya manusia, dapat diukur dengan :

- a. Kemampuan sumber daya manusia pengelola program
- b. Kecukupan jumlah sumber daya manusia pengelola program

2. Tingkat ketersediaan Sumber daya non manusia, dapat diukur dengan :

- a. Ketersediaan dana
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Karna dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan memaparkan secara lebih mendalam tentang Program pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan cara menggambarkan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan, apa saja yang terjadi dalam pelaksanaannya maupun perilaku pelaksanaannya.

Subyek penelitian mengambil informasi dari Ketua BKM Dana Mandiri, Ketua KSM Benresik, Petugas Pengangkut Sampah dan Masyarakat sebagai partisipan.

Cara pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial. Teknik ini mengontraskan atau mencari perbedaan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan hasilnya terhadap penelitian mengenai Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program

Tercapainya tujuan awal pembentukan program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas. Melihat seberapa besar implementasi program ini memiliki kemampuan untuk mengurangi permasalahan sampah, cara pendataan masyarakat yang menjadi peserta, cara agar masyarakat tertarik untuk ikut serta dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini.

Melihat bagaimana tingkat sosialisasi pada awal pembentukan program. Intensitas komunikasi antar pelaksana program tentang kejelasan program, ketetapan informasi yang

diberikan, kejelasan perintah yang diberikan pengelola program, maupun konsistensi pelaksana program itu sendiri.

Sumber Daya yang digunakan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis komunitas ini menggunakan tenaga dari sumber daya manusia yang merupakan masyarakat Kelurahan Sambiroto. Pengelola program yang terlibat termasuk Ketua RT dan RW serta pihak Kelurahan yang menjadi fasilitator Kelurahan wakil dari Pemerintah.

B. Kendala Implementasi Program

Kendala Implementasi merupakan suatu keadaan yang sangat mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan ataupun program. Pada pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kelurahan Sambiroto, kendala yang dialami oleh implementor bersifat teknis. Sebagian besar kendala yang dialami merupakan hal-hal yang masih dapat diatasi. Namun biarpun demikian tetapi kendala sekecil apapun dapat mempengaruhi berjalannya suatu program.

Peneliti menemukan bahwa kendala dalam Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas ini adalah sebagai berikut:

1. Kendala Teknis Pelaksanaan
2. Penunggakan iuran yang berimbas pada kekurangan dana
3. Kekurangan sumber daya

Kendala teknis pelaksanaan saat pengangkutan sampah. Peneliti mendapatkan informasi tentang kendala ini berupa sulitnya akses armada pengangkut sampah atau Viar untuk menjangkau rumah-rumah yang ada di dalam gang-gang sempit. Hal ini menghambat proses pengangkutan sampah dikarenakan sering kali petugas pengangkut sampah tidak sadar sehingga rumah-rumah yang terdapat di gang-gang sempit menjadi luput dari petugas pengangkut sampah.

Kemudian disamping itu terdapat kendala lain berupa terjadinya penunggakan uang iuran dari masyarakat sebagai peserta program. Permasalahan dana merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa uang merupakan roda penggerak keberlangsungan hidup manusia apalagi di jaman yang serba mahal seperti sekarang ini. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini tidak tinggal diam, mereka melakukan musyawarah dan pengarahan lebih kepada Ketua RT/RW yang merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat untuk menghimbau

mengenai kewajiban masyarakat untuk membayar iuran tepat waktu.

Kendala mengenai penunggakan uang iuran ini sangat bertolak belakang dengan yang tertera pada Perda No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 49 tentang retribusi pengelolaan sampah. Apabila dikaitkan dengan permasalahan penunggakan pembayaran iuran program pengelolaan sampah ini maka terlihat adanya ketidakseusian antara realita di lapangan dengan yang terdapat pada Perda.

Selain itu kendala lain yaitu kekurangan jumlah sumberdaya. Ketersediaan Jumlah petugas pengangkut sampah dirasa sangat kurang. Jumlah petugas yang hanya 4 orang dan dengan peserta program yang jumlahnya sangat banyak tersebut membuat petugas pengangkut sampah mengalami keteteran. Disamping itu armada pengangkut sampah pun hanya 2 motor Viar dari hasil bantuan BKM dan dana sumbangan masyarakat. Berkaitan dengan kekurangan sumber daya berupa dana maka pihak pengelola program pun tidak dapat begitu saja menambah jumlah petugas pengangkut sampah maupun armada pengangkut sampah. Jika petugas pengangkut sampah ditambah maka terdapat pengeluaran tambahan untuk membayar gaji petugas tersebut. Begitu pula apabila menambah

armada pengangkut sampah maka diperlukan dana untuk membeli motor Viar sebagai media pengangkut sampahnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai proses implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kelurahan Sambiroto dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah cukup baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan aturan main yang dibuat oleh pengelola program sudah sesuai dengan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Teknis pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah sudah sesuai dengan yang direncanakan pada awal pembentukan program tersebut. Selain itu partisipasi masyarakat seperti yang disebutkan pada Perda No.6 Tahun 2012 pasal 24 yaitu tahapan pewadahan yang dilakukan di lingkup rumah tangga menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh masyarakat sebagai partisipan untuk memudahkan dalam proses pengangkutan.

Namun disamping itu masih terdapat banyak kekurangan dalam segi keefektifan dan efisiensi waktu yang dihabiskan dalam proses pengangkutan sampah. Sehingga hal ini mempengaruhi pada kesuksesan program dalam menjalankan aturan main yang sudah disusun pada awal pembentukan program tersebut.

Hasil penelitian mengenai kendala dalam proses Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang dapat disimpulkan terdapat kendala dalam program tersebut. Kendala yang disebutkan dalam penelitian adalah berupa kendala teknis saat pelaksanaan pengangkutan sampah dimana banyak rumah-rumah dari peserta program yang terdapat di gang-gang sempit sehingga menyulitkan petugas pengangkut sampah untuk mencapai lokasi rumah-rumah tersebut. Disamping itu kendala lain seperti kurangnya ketersediaan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan

program juga mempengaruhi implementasi program. Serta kendala sumber daya non-manusia seperti ketersediaan dana dan sarana dalam implementasi program. Ketersediaan dana yang kurang dikarenakan seringnya masyarakat menunggak uang iuran sehingga perputaran uang menjadi tersendat. Selain itu kekurangan sarana yaitu motor Viar sebagai armada pengangkut sampah pun masih kurang jumlahnya. Kekurangan dana pun yang menyebabkan tidak terhambatnya usaha untuk menambah sarana pengangkut sampah maupun petugas pengangkut sampah.

B. Saran

Proses implementasi program ini dirasa sudah cukup sesuai dengan aturan main yang dirancang sejak awal, namun tetap masih ada kekurangan yang dialami. Perlu ditingkatkan lagi kinerja semua pihak yang terkait agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Disamping itu juga perlu adanya himbauan terhadap masyarakat, yang mana saat ini sudah berpartisipasi dengan baik maka akan lebih baik jika partisipasi dapat terus ditingkatkan. Serta komitmen yang teguh dari semua pihak yang terlibat dalam program ini agar program yang memiliki tujuan baik ini dapat terus berkontribusi dalam usaha penanganan sampah demi mengatasi pencemaran lingkungan.

Kendala dalam proses implementasi program ataupun kebijakan pastilah ada. Dalam Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kelurahan Sambiroto ini, berupa masalah teknis pengangkutan sampah dari rumah-rumah yang berada di dalam gang sempit dapat diatasi dengan lebih telitinya petugas pengangkut sampah dalam melihat dan menghafal rumah peserta dari data yang sudah dibuat pada awal pendaftaran peserta. Selain itu kendala ketersediaan sumber daya manusia dapat dikaitkan dengan kendala ketersediaan sumberdaya non-manusia, yaitu dana. Apabila dibuat

suatu teguran yang dilanjutkan dengan sanksi jika teguran tidak diindahkan, maka ini akan membuat peserta menjadi disiplin dalam membayar iuran. Apabila uang iuran sudah masuk tepat pada waktunya, maka perputaran uang akan berjalan baik. Hal ini akan membantu dalam pemenuhan keterbatasan jumlah sumber daya manusia maupun non-manusia. Pengelola dapat menambah sarana pengangkut sampah berupa Viar begitu pula dengan penambahan petugas pengangkut sampahnya. Dengan begitu maka proses implementasi program dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Grindle, Merilee S (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Priceton University Press

Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung:AlfaBeta

Purwanto, Agus. Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012 *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Santosa, Pandji 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama

Setiyadi, Iwan Tritenty. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*. (Tesis). Yogyakarta: MKPD Universitas Gadjah Mada

Singarimbun, Masri. 2008. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung :Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Press